

Laporan Capaian Kinerja Sementara Triwulan II Tahun 2026
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
1	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan					
	Indikator 1.1 Pertumbuhan Ekonomi	Persen tase	5,4	5,4	5,29	97,96
	Indikator 1.2 Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,82	6,82	7**	102,64**
	Indikator 1.3 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	43	43	51**	81,39**
	Indikator 1.4 Rasio PDB Pariwisata	Persen tase	4,67%	3,96%	4,01%**	101,26**
	Indikator 1.5 Devisa Pariwisata	USD	22,2-22,6 miliar	4,05 miliar	4,05 miliar USD**	100**
	Indikator 1.6 Rasio PDB Industri Pengolahan	Persen tase	21,20	21,20	18,50%	88,94
	Indikator 1.7 Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen tase	29,5% terhadap PDB	29,5% terhadap PDB	29,36%	99,52
2	Sasaran Strategis 2. Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi					
	Indikator 2.1 Tingkat Inflasi	Persen tase	(2,5 ± 1)%	(2,5 ± 1)%	3,34%	100
	Indikator 1.2 Biaya Logistik	Persen tase	13,3% terhadap PDB	13,3% terhadap PDB	14,29**	94,30**
3	Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Sistem Ketenagakerjaan yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan					
	Indikator 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen tase	4,44%-4,96%	4,44%-4,96%	4,68%**	100**

	Indikator 3.2 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	37,95%	37,95%	40,58%**	106,93**
4	Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)	3 (Baik)	100
5	Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)	3 (Baik)	100
6	Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas					
	Indikator 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Indeks	3 dari 4 (baik)	3 dari 4 (baik)	3 (Baik)	100

* Masih bersifat prediksi berdasarkan target tahunan karena tidak dapat dipecah kedalam triwulan

** Masih menggunakan data tahun terdahulu

1 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis 1: **Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan** ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Indeks Ketahanan Energi
3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
4. Rasio PDB Pariwisata
5. Devisa Pariwisata
6. Rasio PDB Industri Pengolahan
7. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan yang teramanatkan dalam RPJMN 2025–2029 adalah mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan tangguh terhadap dinamika global. Pertumbuhan ekonomi dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan output atau pendapatan nasional, tetapi juga sebagai proses berkesinambungan yang mencerminkan keseimbangan antara produksi, distribusi, serta peningkatan efisiensi ekonomi. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait

pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu sama lain atau overlapping. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai penambahan pendapatan nasional atau penambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 adalah sebesar 5,4% (yoy). Dalam proses perhitungan pertumbuhan ekonomi tahunan, BPS mengeluarkan realisasi pertumbuhan ekonomi secara triwulan. Meski dirilis secara triwulanan, perhitungan capaian indikator pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Capaian pertumbuhan ekonomi triwulanan menjadi pijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengawal target tahunan pertumbuhan ekonomi:

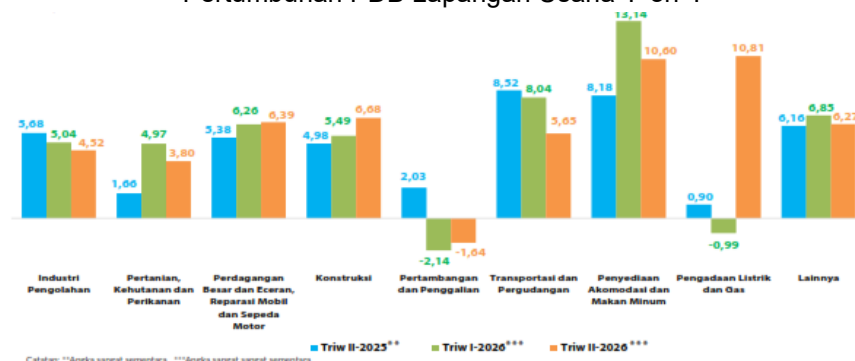
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 1.1 Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,4	5,29	97,96%

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (y-on-y), meskipun secara kuartalan mengalami pertumbuhan sebesar 3,73 persen (q-to-q). Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.552,1 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp3.576,2 triliun. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, konsumsi masyarakat, investasi, serta kinerja positif sejumlah lapangan usaha. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 terutama didorong oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,81 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,60 persen, sedangkan Industri Pengolahan yang memiliki peran dominann terhadap perekonomian Indonesia Indonesia tumbuh sebesar 4,52 persen. Meskipun terdapat kontraksi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,64 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi ditengah musim libur anak sekolah, serta konsumsi pemerintah masih memiliki peran penting dalam menjaga

kesinambungan permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong terutama oleh Konsumsi Pemerintah sebesar 15,97 persen, dan menjadi sumber pertumbuhan sebesar 1,07 persen. Selain itu, Konsumsi LNPR sebesa 6,93 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,87 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,06 persen, serta Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,13 persen. Di sisi lain, Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang mencatat pertumbuhan sebesar 8,82 persen. Peningkatan ini berasal dari peningkatan realisasi belanja pegawai termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), pertumbuhan subkomponen kendaraan serta investasi pemerintah dan swasta sejalan dengan meningkatnya realisasi penanaman modal.

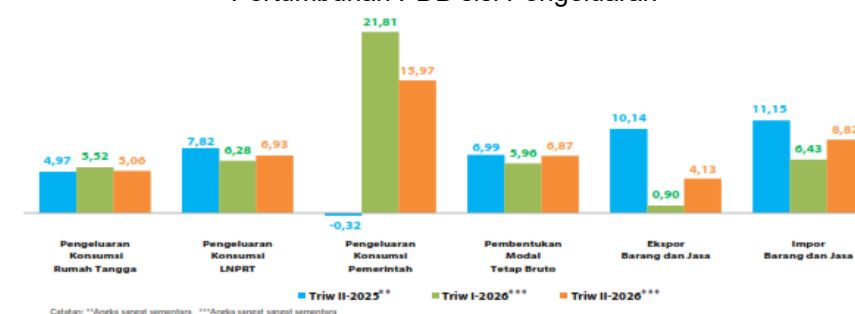
Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha Y-on-Y



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor ekonomi pada triwulan II-2026 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,81 persen, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,60 persen, Konstruksi sebesar 6,68 persen, Perdagangan Besar dan eceran Reparsi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,39 persen, lainnya sebesar 6,27 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,65 persen, Industri Pengolahan sebesar 4,52 persen, serta Pertanian Kehutannya dan Perikanan sebesar 3,80 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar 1,64 persen.

Pertumbuhan PDB sisi Pengeluaran



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran pada triwulan II-2026 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi

pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 15,97 persen, didorong oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah dan program prioritas nasional. Selanjutnya, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 8,82 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,93 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen, serta Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,06 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa tetap tumbuh positif sebesar 4,13 persen pada triwulan II-2026.

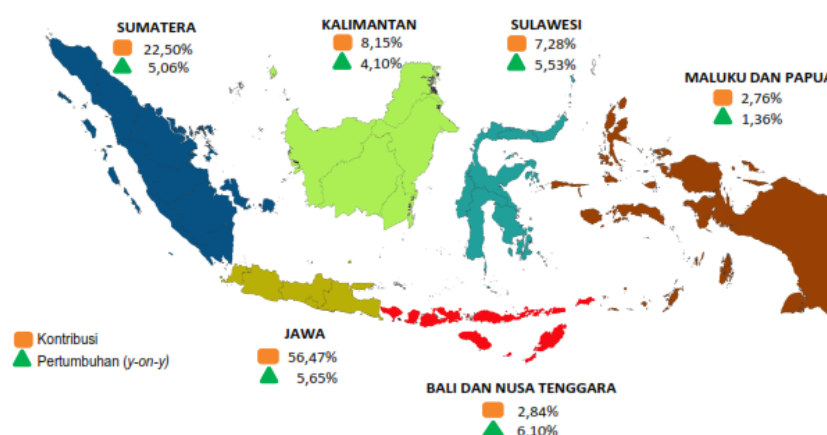
Struktur PDB Sisi Produksi

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan II-2026 masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 18,50 persen. Selanjutnya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,57 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 13,02 persen, Konstruksi sebesar 9,79 persen, serta Pertambangan dan Penggalan sebesar 8,87 persen. Kelima lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi dominan terhadap perekonomian Indonesia dengan total mencapai 63,75 persen

Struktur PDB Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup 53,32 persen terhadap PDB nasional. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 29,36 persen, diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,13 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 7,57 persen, Perubahan Inventori sebesar 2,50 persen, serta Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 1,35 persen. Sementara itu, Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran memiliki kontribusi sebesar 24,06 persen.

Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pulau



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara spasial, Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,47 persen terhadap PDB nasional. Selanjutnya, Pulau Sumatera memberikan kontribusi sebesar

22,50 persen, diikuti Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,28 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,84 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 2,76 persen. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,10 persen, diikuti Jawa sebesar 5,65 persen, Sulawesi sebesar 5,53 persen. Sementara itu, Sumatera sebesar 5,06 persen, Kalimantan tumbuh sebesar 4,10 persen, dan Maluku dan Papua sebesar 1,36 persen.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Pertumbuhan Ekonomi yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi melalui pelaksanaan FGD terkait Permenko KUR nomor 1 dan 2 tahun 2026
- b. Pelaksanaan rapat teknis pembahasan Rakomjak dan Review Usulan PNM
- c. Koordinasi melalui rakor Komite Kebijakan level menteri, rapat koordinasi terkait Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026
- d. Koordinasi dalam Rakor dengan Kementerian/lembaga terkait Proyeksi produksi Gula Kristal Putih atau Gula Konsumsi Nasional
- e. Koordinasi OECD senior-level meeting untuk Environment Policy Committee
- f. Penandatanganan MoU on Economic Cooperation 2.0 oleh Menko Perekonomian bersama dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi korea
- g. Koordinasi melalui pertemuan AEC Council ke-27 dan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina
- h. Koordinasi BIMP-EAGA Summit ke-17 serta pengarahan mengenai arah kerja sama subregional ke depannya dan menyetujui Leaders Joint Statement.
- i. Monitoring evaluasi pelaksanaan program belanja dalam negeri semester I.
- j. Koordinasi terkait penyelesaian Draf Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) Indonesia-Norway

Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- a) Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menghadapi tekanan akibat meningkatnya harga dan berkurangnya momentum konsumsi setelah berakhirnya periode festive season.
- b) Tekanan eksternal dan kinerja perdagangan internasional akibat adanya ketidakpastian perekonomian global
- c) Terdapatnya ketidakseimbangan antara pertumbuhan impor dan ekspor
- d) Tekanan infasi dan nilai tukar dimana sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional

Strategi dan Upaya Perbaikan

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 5,29 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Mendorong penguatan daya beli masyarakat dengan optimalisasi program perlindungan sosial yang tepat sasaran
- b) Mendorong investasi dan memperkuat peran sektor swasta agar sumber pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada investasi yang didorong proyek pemerintah
- c) Memperkuat ekspor dan meningkatkan nilai tambah produk domestik sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas
- d) Meningkatkan produktivitas dan transformasi struktural ekonomi.

1.2. Indeks Ketahanan Energi

Latar Belakang

Indeks Ketahanan Energi adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata, guna mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks ini merepresentasikan kinerja sistem energi dari berbagai aspek strategis, seperti ketersediaan energi (availability), aksesibilitas dan keterjangkauan (accessibility and affordability), ketergantungan energi terhadap luar negeri (security), efisiensi dan keberlanjutan lingkungan (sustainability), serta diversifikasi sumber energi.

1. Availability (Ketersediaan): menilai sejauh mana cadangan dan pasokan energi (primer dan final) cukup untuk kebutuhan nasional.
2. Accessibility: mengukur keterjangkauan infrastruktur dan distribusi energi oleh masyarakat dan industri.
3. Affordability (Keterjangkauan Harga): menilai kemampuan masyarakat untuk membeli energi dengan harga yang wajar.
4. Security (Ketahanan Pasokan): mengukur ketergantungan terhadap impor energi dan kemampuan menghadapi gangguan eksternal.
5. Sustainability & Efficiency: mengukur proporsi energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan energi, dan dampak lingkungan dari sistem energi.
6. Diversifikasi Energi: menilai tingkat variasi sumber energi nasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber.

Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor seperti berikut: memberikan alat ukur yang objektif dan komprehensif untuk mengevaluasi ketahanan energi nasional dari sisi teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan; mendukung perumusan kebijakan energi yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi masa depan, termasuk dalam perencanaan transisi energi nasional; memfasilitasi monitoring dan evaluasi program serta investasi energi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna; mengantisipasi risiko dan gangguan pasokan energi, serta meningkatkan kapasitas respons dan mitigasi melalui diversifikasi dan efisiensi; memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial nasional dengan sistem energi yang handal, adil, dan berkelanjutan; mendorong investasi dan inovasi di sektor energi, dengan memberikan kepastian dan gambaran risiko kepada pelaku usaha.

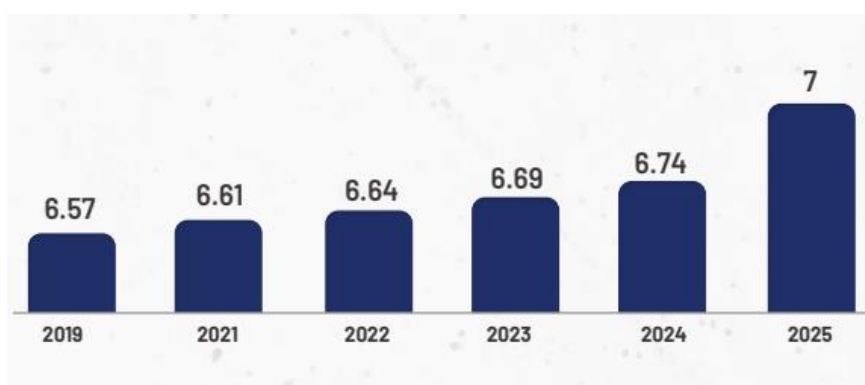
Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Indeks Ketahanan Energi adalah sebesar 6,82 pada tahun 2026. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Indeks Ketahanan Energi pada Triwulan II tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.2 Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,82	7*	102,64

Sumber: Dewan Energi Nasional.

*Angka tahun sebelumnya



Pada Triwulan I 2026, Indonesia terus meneruskan upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Meskipun skor resmi Indeks Ketahanan Energi dari Dewan Energi Nasional (DEN) untuk periode ini belum dirilis, pemerintah terus melakukan upaya demi meningkatkan ketahanan energi melalui kebijakan yang menjaga stabilitas harga energi seperti tarif listrik dan bahan bakar minyak. Pada Tahun 2026, Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor LPG sekitar 80,6 persen, Minyak mentah sekitar 38,7 persen, dan Bahan bakar minyak sekitar 34,2 persen. Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan (skor 6 hingga 7,99). Hal ini dapat dilihat dari indeks ketahanan energi RI dengan capaian skor 7. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencapai indeks ketahanan energi yang ideal dengan skor 7 bahkan 10. Dalam mengukur indeks ketahanan energi, para pakar energi menggunakan 4 aspek yakni, availability, accessibility, affordability dan acceptability. Terkait affordability, Indonesia masih memberikan harga subsidi baik batubara untuk PT PLN (Persero), elpiji, serta bensin masih pemerintah yang menetapkan harga.



Pengukuran ketahanan energi sendiri selain menggunakan aspek 4A (availability, affordability, accessibility, dan acceptability) tadi juga menggunakan metode pembobotan menggunakan AHP (analisa hierarchy process).

Aspek availability adalah ketersediaan sumber energi dan energi baik dari

domestik maupun luar negeri. Selanjutnya, aspek affordability yaitu keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi. Kemudian aspek accessibility adalah kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik. Sedangkan aspek acceptability adalah penggunaan energi yang peduli lingkungan (darat, laut dan udara) termasuk penerimaan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan pencapaian infrastruktur dan kebijakan energi hingga akhir Q1 2025, diyakini bahwa ketahanan energi nasional tetap berada pada kategori Tahan, dengan kemungkinan peningkatan lebih lanjut menuju kategori ideal sesuai target DEN.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Indeks Ketahanan Energi yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi monitoring percepatan pelaksanaan PSN
- Koordinasi usulan Proyek Strategis Nasional sektor ESDM
- Sinkronisasi Pembahasan Percepatan Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia
- Sinkronisasi Harmonisasi RPP Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Sinkronisasi klarifikasi permohonan izin prakarsa RPerpres PLTS 100Gwp
- Koordinasi peninjauan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Indeks Ketahanan Energi ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- Tingginya ketergantungan terhadap impor energi
- Produksi energi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan domestik yang tinggi
- Kapasitas penyimpanan energi masih terbatas sehingga proses stok untuk energi tidak mampu memenuhi kebutuhan
- Masih perlunya transisi energi baru dan terbarukan masih membutuhkan penguatan

Strategi dan Upaya Perbaikan

Indeks Ketahanan Energi Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 7 menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya

yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional melalui percepatan proyek energi bersih.
- b) Meningkatkan produksi energi domestik terutama minyak dan gas bumi
- c) Mendorong peningkatan investasi pada sektor energi, termasuk pengembangan kilang, bioenergi, dan teknologi energi ramah lingkungan.
- d) Memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi nasional.

1.3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global

Latar Belakang

IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara termasuk Indonesia dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur.

Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan.

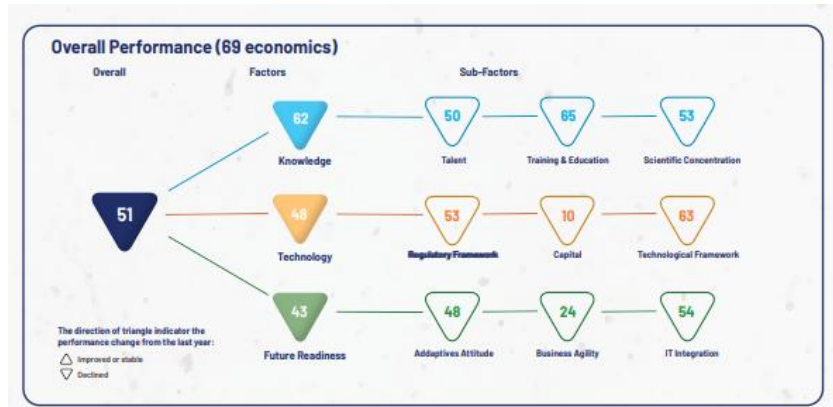
Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global adalah sebesar 43 pada tahun 2026. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global pada Triwulan II tahun 2026 yang dikeluarkan oleh International Institute for Management Development (IMD).

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.3 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	43	51*	81,39

*angka tahun 2025



Awal tahun 2026 posisi Indonesia dalam Indeks Daya Saing Digital yang dirilis IMD World Competitiveness Center berada di peringkat 51 dari 67 ekonomi. Secara dinamika lima tahunan, peringkat Indonesia sempat membaik dari posisi 53 pada Tahun 2021 menjadi 51 pada Tahun 2022, lalu mencapai posisi terbaik pada periode tersebut yaitu peringkat 45 pada Tahun 2023 dan 43 pada Tahun 2024, namun kembali melemah ke posisi 51 pada Tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akselerasi transformasi digital Indonesia belum sepenuhnya konsisten.

Dilihat dari tiga pilar penilaian, faktor *Knowledge* berada pada peringkat 62, dengan komponen yang masih menahan seperti *training and education* di posisi 65 serta *scientific concentration* di posisi 53. Faktor *Technology* berada pada peringkat 48, ditopang kuat oleh aspek *capital* yang berada di posisi 10, namun masih terbatas pada *technological framework* di posisi 63 meskipun *regulatory framework* berada pada posisi moderat yaitu 53. Sementara itu, faktor *Future Readiness* menempati peringkat 43, dengan kekuatan pada *business agility* di posisi 24, namun masih memerlukan penguatan pada *IT integration* di posisi 54 serta *adaptive attitudes* di posisi 46.

Secara regional, Indonesia berada pada peringkat 12 dari 14 negara Asia Pasifik dan peringkat 20 dari 22 negara dengan populasi lebih dari 20 juta jiwa. Hal ini menegaskan bahwa besarnya skala ekonomi belum secara otomatis berbanding lurus dengan tingkat daya saing digital. Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi dalam pelaksanaan program pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project telah dilakukan di Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
- Koordinasi terkait Akselerasi ETPD dan Sosialisasi Pembayaran Digital (KKI)

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- Kualitas talenta dan pengetahun digital masih menjadi kendala utama
- Masih kurangnya kerangka teknologi untuk mendukung akselerasi transformasi digital
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi maju seperti AI dan semikonduktor masih membutuhkan penguatan ekosistem
- Kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital dan kesiapan SDM masih besar

Strategi dan Upaya Perbaikan

Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global pada Triwulan II Tahun 2026 berada pada peringkat 51 menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia digital melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
- b) Memperkuat ekosistem riset, inovasi, dan teknologi melalui kolaborasi lembaga pendidikan, lembaga riset, industri serta pemerintah.
- c) Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital serta penguatan jaringan internet berkecepatan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
- d) Memperkuat kerangka regulasi dan infrastruktur digital sebagai upaya penyediaan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi digital

1.4. Rasio PDB Pariwisata Latar Belakang

Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil.

IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata.

Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti:

- a. Akomodasi
- b. Makanan dan minuman
- c. Transportasi
- d. Agen perjalanan dan tour operator
- e. Aktivitas budaya dan rekreasi
- f. Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata

Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Rasio PDB Pariwisata adalah sebesar 3,96 pada tahun 2026. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Rasio PDB Pariwisata pada Triwulan II tahun 2026 menggunakan data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.4 Rasio PDB Pariwisata	Persentase	3,96	4,01*	101,26*

Sumber: data tahun sebelumnya. Kementerian pariwisata.

Pada triwulan II, capaian rasio PDB Pariwisata belum mendapatkan data dari instansi terkait sehingga masih menggunakan data periode sebelumnya dari instansi terkait. Rasio PDB Pariwisata merupakan indikator strategis yang menunjukkan besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan aktivitas pariwisata terhadap total PDB nasional dalam bentuk persentase. Semakin tinggi rasio yang dicapai, semakin besar pula peran sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Rasio tersebut mencerminkan akumulasi nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan pariwisata, meliputi jasa akomodasi, transportasi wisata, penyediaan makanan dan minuman, jasa perjalanan, hingga sektor seni, budaya, hiburan, dan rekreasi yang dimanfaatkan wisatawan. Dengan demikian, rasio PDB Pariwisata tidak hanya menggambarkan performa sektor pariwisata, tetapi juga menjadi cerminan daya saing industri serta efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata nasional.

Dalam konteks perekonomian Indonesia, peningkatan rasio PDB Pariwisata menjadi indikator nyata keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi destinasi wisata serta memperkuat posisi pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Pemerintah terus mempercepat kontribusi sektor ini melalui pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas layanan, penguatan promosi destinasi, serta pemberdayaan pelaku usaha pariwisata secara berkelanjutan.

Pemantauan rasio PDB Pariwisata secara berkala menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui evaluasi yang konsisten, pembangunan sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sejumlah lapangan usaha yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pariwisata juga tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan tinggi, antara lain Jasa Perusahaan yang mencakup aktivitas agen perjalanan dan biro wisata, Jasa Lainnya seperti hiburan dan rekreasi, Transportasi dan Pergudangan termasuk mobilitas wisatawan, serta sektor Akomodasi dan Makan Minum yang meliputi hotel, penginapan, restoran, dan kafe.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Rasio PDB Pariwisata yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi melalui Rakor pemetaan stimulus dalam rangka mendorong kontribusi sektor Pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi semester II tahun 2026
- b. Koordinasi terkait kebijakan bebas Visa kunjungan

- c. Koordinasi melalui Tourism Investment Dialogue-Investment to Boost Tourism Attraction
- d. Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan Bali Wellness dan Beauty Expo 2026

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Rasio PDB Pariwisata ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- a) Belum terselesaikannya paraf persetujuan dari Menteri Pariwisata dan Menteri Keuangan terhadap draf RPerpres IQTF
- b) Nilai tambah pariwisata belum meningkat secepat pemulihan aktivitas wisata

Strategi dan Upaya Perbaikan

Rasio PDB Pariwisata Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 4,01 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Koordinasi secara intens dengan Kemenpar dan Kemenkeu mengenai pemberian draf persetujuan RPerpres IQTF
- b) Memperkuat keterkaitan pariwisata dengan sektor ekonomi domestik

1.5. Devisa Pariwisata

Latar Belakang

Devisa Pariwisata adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam menghasilkan devisa negara, khususnya melalui pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) selama kunjungan mereka ke Indonesia dalam periode tertentu. Devisa pariwisata merupakan salah satu indikator strategis dalam menilai kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Secara sederhana, devisa pariwisata menggambarkan besarnya pemasukan negara dari pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berkunjung ke Indonesia. Adapun sumber utama pembentuk devisa pariwisata sebagai berikut:

1. Akomodasi

Pengeluaran wisatawan untuk penginapan adalah salah satu kontributor terbesar devisa pariwisata. Hal ini mencakup pembayaran hotel, vila, resort, guesthouse, hingga homestay. Tingginya permintaan terhadap akomodasi berkualitas mendorong pengembangan industri perhotelan dan membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

2. Makanan dan Minuman (Kuliner)

Kuliner Indonesia yang kaya cita rasa turut menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Dari restoran berbintang hingga warung kaki lima, pengeluaran wisatawan pada sektor makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa, sekaligus mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

3. Transportasi Lokal

Setelah tiba di Indonesia, wisatawan membutuhkan transportasi untuk menjelajahi destinasi wisata. Belanja devisa pada sektor ini mencakup sewa kendaraan, tiket pesawat domestik, angkutan umum, kapal wisata, hingga jasa pemandu. Kualitas dan keterjangkauan moda transportasi mempengaruhi kenyamanan dan lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya pengeluaran mereka.

4. Belanja dan Oleh-oleh

Kegiatan berbelanja menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisata. Wisatawan biasanya membeli cendera mata, produk kerajinan tangan, pakaian, perhiasan, atau produk khas daerah lainnya. Pengeluaran ini menjadi ladang penghasilan bagi UMKM lokal, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah tujuan wisata.

5. Atraksi dan Rekreasi

Wisatawan juga mengeluarkan uang untuk menikmati berbagai atraksi wisata, seperti tiket masuk objek wisata, pertunjukan budaya, taman hiburan, paket wisata bahari, dan kegiatan petualangan alam. Semakin banyak pilihan atraksi berkualitas, maka semakin besar peluang devisa yang dihasilkan.

6. Jasa Lainnya

Komponen ini mencakup berbagai layanan pendukung seperti jasa tur dan travel, fotografi profesional, spa dan wellness, komunikasi, dan layanan pribadi lainnya. Walaupun porsinya tidak sebesar komponen utama lainnya, jasa ini turut memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus memberikan kontribusi tambahan terhadap devisa.

Dalam perumusannya, IKU ini terdiri dari dua komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan. Angka ini mencerminkan volume wisatawan yang berhasil ditarik oleh daya tarik destinasi, promosi internasional, serta kemudahan akses masuk ke Indonesia. Komponen kedua adalah rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara selama kunjungan mereka. Pengeluaran ini mencakup berbagai aktivitas seperti akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi lokal, rekreasi, belanja oleh-oleh, serta jasa lainnya. Kombinasi dari kedua komponen tersebut—jumlah wisatawan dan besarnya pengeluaran mereka—menghasilkan nilai devisa pariwisata yang digunakan sebagai indikator keberhasilan program pembangunan sektor pariwisata nasional. IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja kementerian terkait, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan ekonomi nasional serta pembentukan kebijakan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

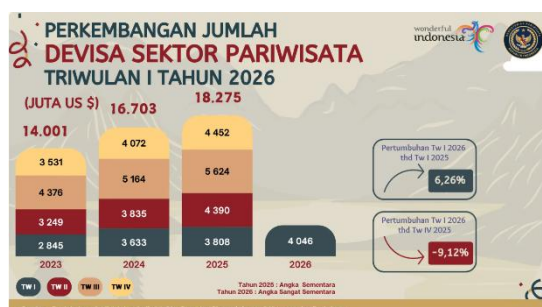
Target Devisa Pariwisata terhadap adalah sebesar 22,20 miliar – 22,26 miliar pada tahun 2026. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Devisa Pariwisata pada Triwulan I tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
Indikator 1.5 Devisa Pariwisata	USD	4,05 miliar	4,05 miliar	100

Sumber: Kementerian Pariwisata. Data triwulan I.

Pada triwulan I tahun 2026, sektor pariwisata Indonesia menunjukkan kinerja awal yang positif seiring meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Secara kumulatif Januari–Maret 2026, jumlah kunjungan wisman tercatat sekitar 3,44 juta kunjungan, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan penerimaan devisa pariwisata sepanjang tahun 2026 berada pada kisaran US\$22,2 miliar hingga US\$22,6 miliar, lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun 2026. Dengan tren kenaikan

kunjungan wisatawan dan penguatan mobilitas domestik selama periode libur awal tahun, penerimaan devisa pariwisata triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh secara bertahap dibanding triwulan sebelumnya.



Pada Triwulan I 2026, kinerja devisa sektor pariwisata Indonesia menunjukkan prospek yang positif dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun. Seiring meningkatnya mobilitas wisatawan internasional

dan domestik, sektor pariwisata terus memperlihatkan pemulihan yang solid. Pemerintah bahkan menetapkan target penerimaan devisa pariwisata tahun 2026 pada kisaran US\$22,2 miliar hingga US\$22,6 miliar, lebih tinggi dibanding target tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan optimisme terhadap meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

Peningkatan kinerja tersebut didorong oleh pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara. Pada periode Januari–Maret 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sekitar 3,44 juta kunjungan, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan kunjungan ini turut mendorong aktivitas ekonomi pada berbagai subsektor pariwisata, seperti akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, hiburan, serta jasa perjalanan yang menjadi penopang utama pergerakan ekonomi sektor pariwisata.

Kinerja positif pada awal tahun ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian target nasional sektor pariwisata sepanjang 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus memperkuat strategi pengembangan destinasi prioritas, penguatan desa wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta promosi internasional yang lebih terarah guna menarik wisatawan mancanegara berkualitas dan berdaya beli tinggi.

Dengan strategi tersebut serta momentum libur nasional dan musim perjalanan pertengahan tahun yang akan datang, sektor pariwisata diharapkan mampu terus meningkatkan penerimaan devisa pada triwulan-triwulan berikutnya. Penguatan ini juga diharapkan mampu mendorong kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Devisa Pariwisata yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi dalam FGD Penguatan Tata Kelola Risiko melalui Pengembangan Ekosistem Asuransi Pariwisata untuk Membangun Pariwisata Berkualutas dan berkelanjutan
- Pembentukan tim penyusun Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target transaksi berjalan ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- a) Adanya fragmentasi kewenangan serta belum terintegrasinya regulasi dan asuransi dikalangan wisatawan dan pelaku usaha
- b) Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global memengaruhi daya beli, keputusan perjalanan, biaya lainnya terhadap kunjungan mancanegara

Strategi dan Upaya Perbaikan

Devisa Pariwisata Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar USD4,05 miliar menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2026 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Perlunya dibangun model tata kelola terpadu yang menghubungkan standar keselamatan, sertifikasi, perizinan, pengawasan, dan kepesertaan asuransi.
- b) Perlunya percepatan pelaksanaan kebijakan pendorong konsumsi dan mobilitas masyarakat yang mampu mendorong sektor pariwisata

1.6. Rasio PDB Industri Pengolahan

Latar Belakang

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Badan Pusat Statistik adalah ukuran ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kinerja atau performa pembangunan, khususnya di bidang ekonomi makro. PDB merupakan ukuran ekonomi makro yang menggambarkan nilai total output akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. PDB digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan (Manufacturing GDP) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu (biasanya per tahun atau triwulan). Industri Pengolahan ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Sektor Industri Pengolahan di Indonesia menjadi salah satu penggerak utama ekonomi sehingga industri ini mampu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas relatif tinggi.

Rasio PDB Industri Pengolahan adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah atau negara. Indikator ini mengukur sejauh mana sektor industri pengolahan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Rasio PDB Industri Pengolahan merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Rasio PDB Industri Pengolahan yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Rasio PDB Industri Pengolahan.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Rasio PDB Industri Pengolahan adalah sebesar 21,20 persen pada tahun 2026. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Rasio PDB Industri Pengolahan pada Triwulan II tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.6 Rasio PDB Industri Pengolahan	Persentase	21,20	18,50	88,94%

Sumber: Badan Pusat Statistik. data diolah.

Awal tahun 2026 triwulan II, sektor industri pengolahan tetap mempertahankan peran strategis sebagai tulang punggung struktur perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, sektor ini terus menunjukkan resiliensi serta menjadi salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja positif tersebut menegaskan keberlanjutan peran industri pengolahan dalam mendorong aktivitas produksi, investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja di Pada Triwulan II tahun 2026, dari sisi laju pertumbuhan industri pengolahan tumbuh 4,52% (y-on-y) melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sekitar 5,04%. Hal ini dapat diartikan meskipun peranan industri dalam struktur ekonomi masih sangat besar, terdapat indikasi perlambatan momentum ekspansi industri yang perlu menjadi perhatian kedepannya.

Dari sisi struktur ekonomi nasional, industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor ini pada tahun 2026 mencapai 18,50% dari total PDB nasional dan diperkirakan tetap dominan sampai akhir tahun 2026. Posisi tersebut menegaskan bahwa sektor manufaktur masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi berbasis produksi di Indonesia.

Peningkatan kinerja industri pengolahan pada Triwulan II 2026 didorong oleh penguatan beberapa komponen utama, yaitu volume produksi, volume total pesanan, dan persediaan barang jadi yang seluruhnya berada pada fase ekspansi. Hal ini mencerminkan meningkatnya permintaan pasar dan terjaganya optimisme dunia usaha terhadap prospek industri nasional.

Berdasarkan subsektornya, yang menjadi penopang kinerja industri pada periode ini, industri makanan dan minuman tumbuh 6,51% dan memberikan sumber pertumbuhan terbesar, diikuti industri barang logam yang tumbuh 8,04%, kimia dan farmasi 4,99%, tekstil dan pakaian jadi 6,36%, serta alat angkutan 5,45%.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Rasio PDB Industri Pengolahan yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi rapat pembahasan dukungan pemerintah untuk mobil nasional
- Sinkronisasi melalui rapat Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis
- Koordinasi dalam FGD Penajaman Penyusunan Naskah Kajian Kebijakan Penguatan Industrialisasi Kendaraan Listrik melalui Insentif TKDN dan Pengelolaan Limbah Baterai
- Koordinasi melalui rapat terkait rencana Penguatan Industri Baja Nasional
- Koordinasi melalui Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Rasio PDB Industri Pengolahan ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- a) Kondisi kestabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor
- b) Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi
- c) Masih terdapat ketergantungan terhadap impor mesin, peralatan, dan bahan baku sehingga biaya produksi sangat rentan terhadap nilai tukar.

Strategi dan Upaya Perbaikan

Rasio PDB Industri Pengolahan Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 18,50 persen. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Penguatan Mitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan stakeholder terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor
- b) Melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud
- c) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri melalui modernisasi mesin, efisiensi proses produksi, penerapan lean manufacturing, otomatisasi, serta pengurangan downtime.

1.7. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Latar Belakang

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu:

1. Bangunan Tempat Tinggal
2. Bangunan bukan tempat tinggal
3. Konstruksi lainnya
4. Mesin pembangkit dan penggerak mula
5. Peralatan informasi dan telekomunikasi
6. Mesin lainnya
7. Pesawat terbang dan sejenisnya
8. Kapal dan sejenisnya
9. Kereta api dan sejenisnya
10. Kendaraan bermotor
11. Alat pengangkut lainnya
12. Ternak besar
13. Hewan lainnya
14. Tanaman perkebunan
15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya
16. Tanaman lainnya
17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu

18. Peralatan dari logam
19. Barang dari kain & kulit
20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur
21. Peralatan kedokteran dan kesehatan
22. Peralatan lainnya
23. Produk kekayaan intelektual
24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi

Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain:

- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.
- Berguna sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis bagi pihak swasta, karena memberikan informasi tentang posisi dan kondisi perekonomian suatu wilayah Negara dan menjadi perkiraan dalam menentukan nilai investasi.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB pada tahun 2026 adalah sebesar 29,5 persen. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Triwulan II tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.7 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persentase	29,5	29,36	99,52

Sumber: Badan Pusat Statistik. data diolah.

Pada Triwulan I tahun 2026, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PMTB tumbuh sebesar 6,87 persen secara tahunan (y-on-y), dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 29,36 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi nasional masih terjaga kuat di tengah dinamika ekonomi global.

Capaian ini mencerminkan tetap terjaganya aktivitas investasi, baik pada pembangunan infrastruktur maupun penambahan kapasitas produksi dan barang modal, serta menunjukkan adanya kepercayaan dunia usaha terhadap prospek perekonomian nasional. Peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, kualitas investasi tetap perlu menjadi perhatian agar peningkatan PMTB semakin diarahkan pada sektor-sektor produktif, bernilai tambah tinggi, dan mampu memberikan dampak berganda yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Dari sisi nominal, nilai PMTB pada triwulan II-2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.923,7 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp1.089,5 triliun. PMTB juga menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan andil sebesar 2,06 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2026 yang tercatat sebesar 5,29 persen (y-on-y).

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi dalam penyusunan dan penyampaian data/laporan mengenai investasi di bidang hilirisasi triwulan I 2026.
- b. Koordinasi melalui rapat pembahasan capaian realisasi pembiayaan sektor usaha komoditas rumput laut tahun 2025 dan triwulan I 2025
- c. Sinkronisasi melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi KADI Jawa Barat terakit pelaksanaan berusaha

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Pembentukan Modal Tetap Bruto ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- a) Ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, dan perlambatan ekonomi global dapat memengaruhi keputusan investasi dan prospek ekspansi dunia usaha
- b) Masih lambatnya realisasi investasi karena komitmen investasi belum selalu dapat dikonversi menjadi proyek
- c) Biaya investasi masih relatif tinggi seperti harga mesin, peralatan, energi, konstruksi, dan pembiayaan dapat meningkatkan pembentukan modal dan memengaruhi kelayakan proyek investasi.

Strategi dan Upaya Perbaikan

Pembentukan Modal Tetap Bruto Indonesia pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 29,36 persen terhadap PDB. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Mempercepat pelaksanaan investasi dan pembangunan Proyek Strategis Nasional melalui penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
- b) Mendorong peningkatan investasi sektor produktif melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal.
- c) Memperkuat hilirisasi dan rantai pasok domestik sebagai upaya mengurangi biaya produksi.

Pencapaian Sasaran Strategis 2: **Terkendalnya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Tingkat Inflasi dan Biaya Logistik.

2.1 Tingkat Inflasi

Latar Belakang

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi supply, sisi demand, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan riil masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan.

Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian.

Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbagunya inflasi di kisaran antara lain:

- A. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
- B. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- C. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut:

- (1) Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target
- (2) Cadangan beras pemerintah

(3) Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana.

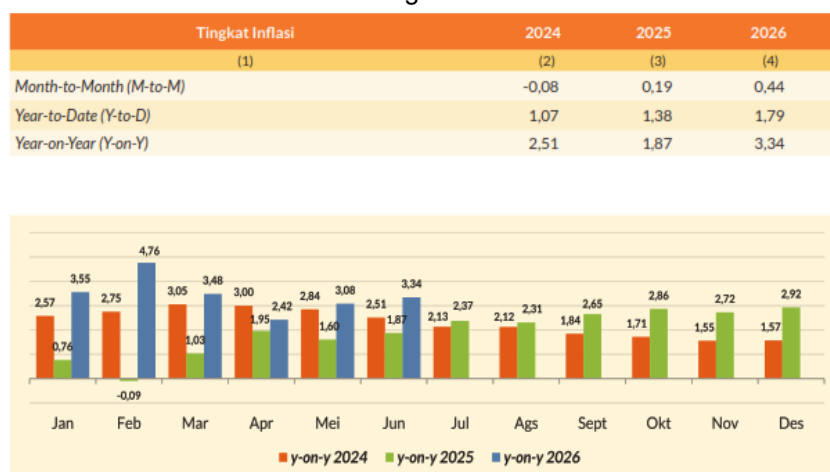
Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar $2,5 \pm 1$, data kinerja terkait inflasi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik secara bulanan. Untuk mengukur capaian kinerja triwulanan adalah dengan membandingkan inflasi secara *year-on-year* yang baru dapat diperoleh datanya pada setiap bulan ketika bulan tersebut sudah lewat. adapun perhitungan capaian kinerja ini dengan membandingkan inflasi pada bulan Maret 2026 dengan Maret 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU 2.1. Tingkat Inflasi	Persentase	$2,5 \pm 1$	3,34	100%

Inflasi Juni 2026 tercatat 3,34% (yoy) berada dalam kondisi stabil sejak Januari 2026. Perkembangan inflasi IHK Juni 2026 dipengaruhi terutama oleh inflasi kelompok administered price (AP) dan inti. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen. Sedangkan Inflasi tertinggi Kabupaten/Kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 7,84 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 1,70 persen.

Grafik.1 Perkembangan Inflasi 2024 - 2026



Inflasi bulanan selama tahun 2026 ini dari Januari hingga Juni, Inflasi tercatat sebesar 0,44 (mtm), lebih tinggi dari Mei 2026 yang sebesar 3,08% (yoy). Perkembangan inflasi IHK Juni 2026 dipengaruhi terutama oleh inflasi kelompok administered prices (AP) dan inti. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,76% (yoy), lebih tinggi dari Mei 2026 sebesar 2,59% (yoy). Kelompok AP mengalami inflasi sebesar 3,42% (yoy), lebih tinggi dari Mei 2026 sebesar 2,07% (yoy). Kelompok volatile food (VF) mengalami inflasi sebesar 5,58% (yoy), lebih rendah dari Mei 2026 sebesar 6,24% (yoy). Secara bulanan, kelompok inti, VF, dan AP mengalami inflasi masing-masing sebesar

Tabel.1 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (%)

Komponen	IHK Juni 2025	IHK Desember 2025	IHK Juni 2026	Tingkat Inflasi M-to-M Juni 2026 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Juni 2026 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Juni 2026 ³⁾ (%)	Andil Inflasi M-to-M Juni 2026 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Juni 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	108,27	109,92	111,89	0,44	1,79	3,34	0,44	3,34
Inti	106,66	107,86	109,60	0,23	1,61	2,76	0,15	1,77
Harga Diatur Pemerintah	110,03	110,90	113,79	1,41	2,61	3,42	0,27	0,66
Bergejolak	112,76	117,24	119,05	0,14	1,54	5,58	0,02	0,91
Energi	107,16	107,66	110,24	1,92	2,40	2,87	0,21	0,32
Bahan Makanan	111,46	115,17	117,51	0,18	2,03	5,43	0,04	1,11

1. Perkembangan inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23% (mtm), relatif lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,13% (mtm). Realisasi inflasi inti tersebut disumbang terutama oleh transmisi peningkatan harga komoditas global dan tekanan nilai tukar di tengah ekspektasi inflasi yang masih terjaga dalam kisaran sasaran. Secara tahunan, inflasi inti Juni 2026 tercatat sebesar 2,76% (yoy), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,59% (yoy).
2. Pada Juni 2026, komponen VF mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm), menurun dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,22% (mtm). Inflasi kelompok *volatile food* didorong oleh penurunan pasokan pada musim tanam, peningkatan biaya angkutan barang global dan dampak kenaikan tekanan nilai tukar, serta berakhirnya panen raya padi. Komoditas yang menyumbang inflasi pada kelompok ini yaitu komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras. Secara tahunan, kelompok *volatile food* mengalami inflasi sebesar 5,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 6,24% (yoy). Ke depan, inflasi *volatile food* diperkirakan tetap akan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia, TPIP dan TPID serta penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
3. Inflasi komponen *Administered Prices* (AP) pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 1,41% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami Inflasi sebesar 0,52% (mtm). Inflasi kelompok *administered prices* disumbang terutama oleh penyesuaian harga energi domestik akibat gejolak harga energi global, serta peningkatan permintaan angkutan udara pada periode libur sekolah. Secara tahunan, inflasi kelompok *administered prices* tercatat sebesar 3,42% (yoy), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,07% (yoy).

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Tingkat Inflasi yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Terlaksananya laporan Menko kepada Presiden terkait Realisasi Inflasi dan Intervensi Pemerintah TW I 2026 melalui surat nomor: B/EKM.02.05/107A/M.EKON/04/2026.
- b. Terlaksananya Rapat Koordinasi TPID wilayah Jawa
- c. Terlaksananya capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID
- d. Terlaksananya verifikasi dokumen penilaian yang telah disampaikan oleh TPID melalui Surat Keputusan Kemenko Perekonomian yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-01/SET.TPIP/06/2026

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Inflasi ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- a) Kelompok VF masih menjadi sumber utama tekanan inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,67% (yoy) dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi nasional sebesar 1,36%.
- b) Kelompok AP juga memberikan tekanan terhadap inflasi, terutama dari kelompok transportasi yang mengalami inflasi 4,57% (yoy) dengan andil 0,55% terhadap inflasi nasional.

Strategi dan Upaya Perbaikan

Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2026 dalam mengupayakan pencapaian target Tingkat Inflasi tersebut sebagai berikut:

- a) Memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui optimalisasi peran TPIP dan TPID dalam menjaga stabilitas harga pangan strategis.
- b) Meningkatkan kelancaran distribusi dan konektivitas logistik antarwilayah melalui penguatan kerja sama antardaerah serta pemantauan distribusi komoditas strategis.

2.2 Biaya Logistik

Latar Belakang

Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa.

Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu:

1. Biaya Transportasi
2. Biaya Pergudangan
3. Biaya Penyimpanan Persediaan (Inventory)
4. Biaya Administrasi

Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila

biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

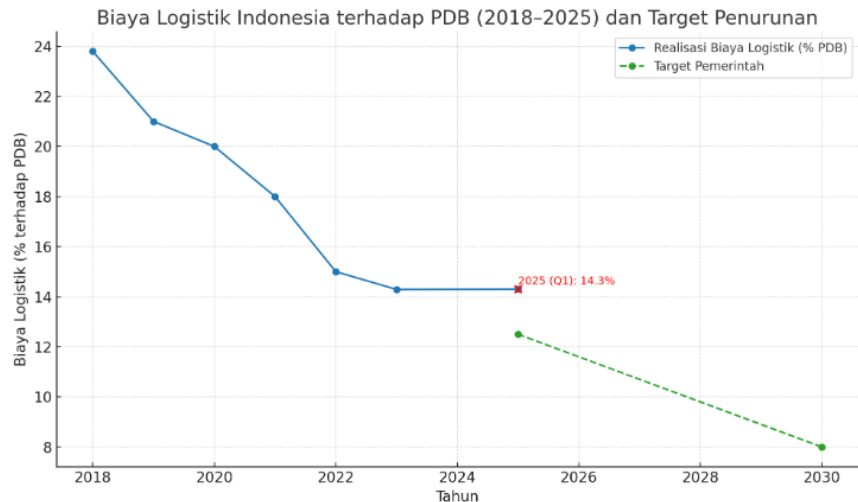
Target kinerja Biaya Logistik terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 13,3%, data kinerja terkait biaya logistik dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik secara tahunan. Untuk mengukur capaian kinerja adalah dengan membandingkan data biaya logistik tahun saat ini dengan tahun sebelumnya, adapun informasi terkait biaya logistik ini masih bersifat sementara karena masih menggunakan data tahun sebelumnya mengingat data tahun terbaru belum dirilis. Berikut data angka sementara terkait biaya logistik:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.2 Biaya Logistik	Persen tase	13,3% terhadap PDB	14,29%*	94,30*

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2023.

*data tahun terdahulu (2023)

Pada Triwulan I tahun 2026, biaya logistik Indonesia tercatat berada pada kisaran 13,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan masih tingginya beban logistik nasional jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang umumnya telah berada di bawah 10 persen dari PDB. Meskipun terdapat tren penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pada 2018 biaya logistik sempat mencapai 23,8 persen dari PDB tantangan struktural dan operasional masih membebani sistem logistik nasional.



Berdasarkan dengan grafik diatas dapat dilihat terdapat perbaikan dari Tahun 2018 sampai dengan 2025, dimulai tahun 2018 dengan persentase Biaya Logistik Nasional terhadap PDB sebesar 23,8 persen kemudian terus mengalami perbaikan pada sistem logistik nasional sehingga pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 14,29 persen. Lonjakan biaya logistik pada periode triwulan ini terjadi disebabkan oleh adanya pembatasan mobilitas truk saat perayaan HBKN.

Tingginya biaya logistik nasional tersebut berdampak pada menurunnya daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun ekspor. Biaya logistik yang tinggi menghambat efisiensi rantai pasok dan menurunkan minat investasi di sektor perdagangan dan manufaktur. Selain itu, ketidakefisienan distribusi juga menyebabkan disparitas harga antarwilayah, yang dapat memicu tekanan inflasi dan mengganggu kestabilan pasokan barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Biaya Logistik yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi rapat pembahasan penyusunan kualifikasi Profesi Warehouse Operator dan Freight Forwarder Nasional
- Pelaksanaan FGD pembahasan strategi meningkatkan pemanfaatan moda pengangkutan barang berbasis Rel
- Sinkronisasi melalui Upgrading kualifikasi SDM sektor pergudangan logistik
- Koordinasi melalui rapat Program UMKM Logistik
- Koordinasi melalui rapat persiapan Focus Group Discussion Road to ALFI CONFEX

Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- a) Tingginya biaya transportasi dan distribusi barang antarwilayah akibat belum optimalnya konektivitas infrastruktur logistik nasional.
- b) Ketimpangan fasilitas logistik dan pelabuhan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih menyebabkan tingginya disparitas biaya distribusi.
- c) Proses layanan logistik dan bongkar muat di beberapa pelabuhan masih menghadapi kendala efisiensi dan waktu tunggu (dwelling time) yang relatif tinggi.

Strategi dan Upaya Perbaikan

Biaya Logistik Nasional pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 14,29 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Mempercepat penguatan konektivitas logistik nasional melalui pembangunan dan optimalisasi infrastruktur transportasi, pelabuhan, dan kawasan logistik terpadu.
- b) Mendorong peningkatan efisiensi layanan pelabuhan dan distribusi barang melalui penyederhanaan proses layanan logistik dan percepatan dwelling time.
- c) Memperkuat implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) dan integrasi sistem digital logistik antar Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan efektivitas rantai pasok nasional.

3

Sasaran Strategis 3: *Terwujudnya Sistem Ketenagakerjaan yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan.*

Pencapaian Sasaran Strategis 3: **Terwujudnya Sistem Ketenagakerjaan yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal.

3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Latar Belakang

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dihitung sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mencari kerja. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah/negara pada periode tertentu. Tingkat Pengangguran Terbuka mengukur seberapa besar persentase angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan adanya banyak orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyediaan lapangan kerja suatu negara. Ketika pengangguran tidak bisa teratasi dengan baik tentunya lapangan kerja akan semakin minim karena adanya ketidakseimbangan antara kedua faktor tersebut. Tingginya tingkat pengangguran tentunya pasti akan

mempengaruhi lapangan kerja dan menjadi pengganggu bagi tercapainya tujuan negara.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

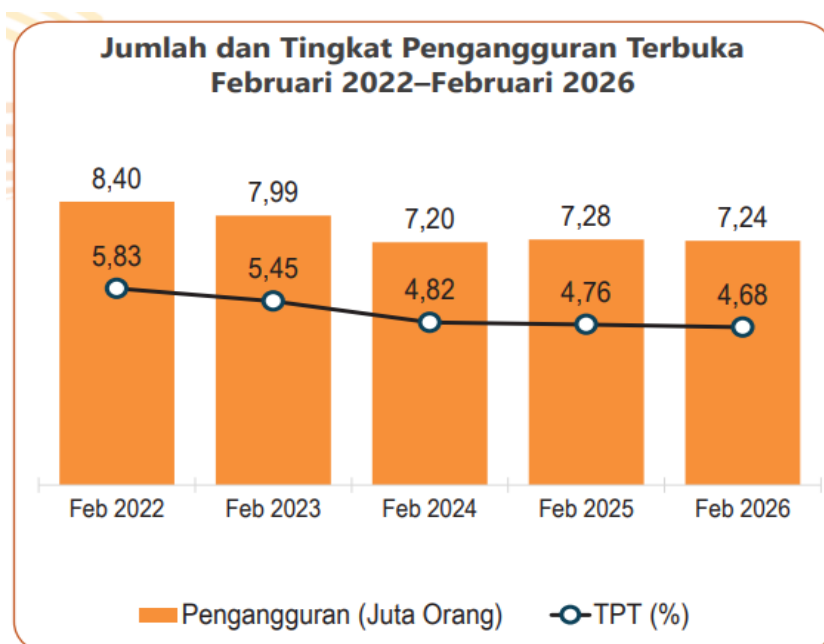
Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka ini pada tahun 2026 sebesar **4,44%-4,96** persen, data kinerja terkait Tingkat Pengangguran Terbuka dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sakernas. Adapun perhitungan capaian kinerja ini dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44%-4,96%	4,68*	100*

*data periode sebelumnya

Pada triwulan II tahun 2026, masih menggunakan data periode sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 4,68% turun 0,08 persen poin dibanding Februari 2025 dari total angkatan kerja nasional. Angka ini menunjukkan penurunan tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,74%, mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja secara nasional.



Meskipun secara persentase terjadi penurunan, jumlah penganggur secara absolut mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 7,46 juta orang, atau menurun sekitar 1.000 orang (13,38%) dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, perkembangan usaha mikro dan kecil, serta perbaikan iklim usaha yang mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja.

Penurunan TPT ini sekaligus menjadi indikasi bahwa pemulihan ekonomi nasional mulai memberi dampak pada dunia kerja, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dalam hal penciptaan kerja berkualitas, terutama bagi angkatan kerja muda dan lulusan pendidikan menengah ke atas. Kemudian adanya mismatch keterampilan dan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing dipasar kerja yang terus mengalami transformasi.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat sektor-sektor strategis penyerap tenaga kerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja formal yang semakin dinamis.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi lintas K/L terkait pembahasan tindak lanjut Program SMK Go Global
- b. Koordinasi terkait pembahasan Force Labor dan Pekerja Anak
- c. Koordinasi melalui keterlibatan tripartite technical meeting untuk menyusun Decent Work Country Program 2026-2030

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas
- b) Kualitas dan produktivitas lapangan kerja masih menjadi tantangan
- c) Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (skill mismatch) masih menjadi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja formal.
- d) Pengangguran pada kelompok usia muda masih perlu menjadi perhatian.

Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2026 dalam mengupayakan pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut sebagai berikut: periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- a) Mendorong peningkatan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan investasi dan pengembangan sektor industri padat karya.
- b) Memperkuat program peningkatan kompetensi dan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan industri.

- c) Menyediakan program *career coaching*, *internship*, pelatihan digital, kewirausahaan muda, dan penempatan kerja khusus bagi *fresh graduate*
- d) Mendorong pengembangan UMKM dan kewirausahaan melalui perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan digitalisasi ekonomi.

3.2 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Latar Belakang

Lapangan kerja adalah kesempatan atau tempat bagi seseorang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, baik di sektor formal maupun informal, sesuai dengan keahlian, pendidikan, atau keterampilan yang dimilikinya. Sementara itu, Lapangan kerja formal adalah jenis pekerjaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan umumnya memiliki perlindungan hukum serta hak-hak tenaga kerja yang jelas. Beberapa ciri-ciri lapangan kerja formal: Status hukum jelas; perjanjian kerja tertulis; upah minimum dan jaminan sosial; jam kerja dan cuti diatur; pajak dan iuran dibayarkan.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal merupakan persentase peningkatan lapangan kerja formal dibandingkan dengan total peningkatan lapangan kerja (formal dan informal) dalam suatu periode waktu tertentu. Proporsi ini tidak hanya mengukur kuantitas lapangan kerja yang diciptakan, tetapi juga kualitasnya. Penyediaan lapangan kerja yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pekerjaan yang tersedia, tetapi juga seberapa banyak dari pekerjaan tersebut yang memenuhi standar formal. Proporsi lapangan kerja formal yang tinggi dapat menciptakan lingkaran positif. Pekerja formal memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Proporsi Lapangan Kerja Formal merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Proporsi Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Proporsi Lapangan Kerja Formal.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

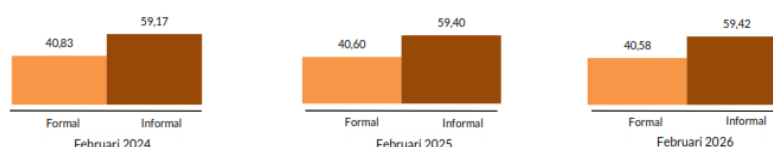
Target kinerja Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ini pada tahun 2026 sebesar 37,97 persen, data kinerja terkait Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sakernas. Adapun perhitungan capaian kinerja ini dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 3.2 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	37,95%	40,58*	106,93*

*data periode sebelumnya

Pada Triwulan II 2025, masih menggunakan data periode sebelumnya Capaian untuk indikator Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal mencapai 40,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa sekitar empat dari

sepuluh penduduk bekerja berada pada sektor formal. Secara jumlah, pekerja formal meningkat menjadi 59,93 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya kesempatan kerja formal, meskipun sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 sebesar 5,61% turut didukung oleh peningkatan aktivitas pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja formal.



Sumber: BPS. SAKERNAS 2026.

Penurunan proporsi pekerja formal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk bekerja secara keseluruhan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan pekerja formal. Dengan kata lain, meskipun lapangan kerja formal terus bertambah, tambahan kesempatan kerja masih lebih banyak terjadi pada kegiatan informal sehingga kontribusi pekerja formal terhadap total penduduk bekerja mengalami penyesuaian secara marginal.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja melalui perluasan kesempatan kerja formal masih menghadapi tantangan, terutama dalam mendorong transformasi tenaga kerja dari sektor informal menuju sektor formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor produktif, peningkatan daya saing industri, serta fasilitasi usaha mikro dan kecil agar mampu berkembang dan menciptakan pekerjaan formal yang lebih luas.

Meskipun proporsi pekerja formal belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, pertambahan jumlah pekerja formal menjadi indikasi positif bahwa proses pemulihan dan ekspansi pasar kerja tetap berlangsung. Ke depan, peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja menjadi fokus penting agar pertumbuhan kesempatan kerja tidak hanya meningkatkan jumlah pekerja, tetapi juga memperbesar porsi pekerjaan formal yang memberikan perlindungan dan kepastian kerja yang lebih baik.

Secara keseluruhan, peningkatan proporsi lapangan kerja formal ini menjadi indikator penting dalam upaya memperkuat kualitas tenaga kerja nasional. Ke depan, akselerasi penciptaan lapangan kerja formal akan menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, produktivitas nasional, dan daya saing ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk

mencapai target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi High Level Roundtable Discussion Link and Match Pelatihan dan Penempatan Kerja Kawasan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian
- b. Sinkronisasi dalam rapat Harmonisasi RPermenaker Perubahan kedua Permenaker 8/2025
- c. Koordinasi dan monitoring perkembangan pembentukan satuan tugas mitigasi pemberhentian hubungan kerja (PHK) dan kesejahteraan buruh.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan sektor informal masih relatif tinggi dibandingkan sektor formal sehingga penyerapan tenaga kerja formal belum optimal.
- b) Sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM, masih menghadapi keterbatasan kapasitas usaha dan pembiayaan untuk melakukan ekspansi tenaga kerja formal.
- c) Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan pada sektor formal.

Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2026 dalam mengupayakan pencapaian target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal tersebut sebagai berikut: periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- a) Mendorong pengembangan sektor industri padat karya dan sektor produktif lainnya guna meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal.
- b) Memperkuat dukungan kepada UMKM melalui akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan fasilitasi legalitas usaha agar mampu bertransformasi ke sektor formal.
- c) Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

4

Sasaran Strategis 4: *Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 4 : ***Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*** ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam pelaksanaannya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif

Kebijakan Perekonomian

dan terintegrasi. Menteri yang bertanggung jawab atas Indeks Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi Pengendalian adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Koordinasi PERNiagaan dan Ekonomi Digital adalah:

1. Kebijakan terkait Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Kebijakan terkait Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Kebijakan terkait Penyelesaian Penugasan Pemerintah
4. Kebijakan terkait Tingkat Inflasi
5. Kebijakan terkait Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital
6. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Bilateral
7. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Regional
8. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral
9. Kebijakan terkait Kerja Sama Investasi dan Hilirisasi
10. Kebijakan terkait Ekonomi Makro dan Fiskal
11. Kebijakan terkait Digital Economy Framework Agreement
12. Kebijakan terkait Program Belanja Masyarakat
13. Kebijakan terkait Pengendalian Impor
14. Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara, dan Rel
15. Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
16. Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
17. Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
18. Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri
19. Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
20. Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
21. Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
22. Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
23. Kebijakan terkait Pengembangan Biofuel
24. Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
25. Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
26. Kebijakan terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara
27. Kebijakan terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
28. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
29. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
30. Kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
31. Kebijakan terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
32. Kebijakan terkait Pengembangan Pariwisata

Adapun Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal business yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang

menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tahapan 1. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait kebijakan perekonomian dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Dokumen Identifikasi dan Penetapan ruang lingkup yang diselesaikan
2. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy Brief
3. Telaah staf tentang urgensi penanganan isu

Tahapan 2. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan alternatif rekomendasi yang berisikan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy brief
2. Telaah staf tentang kebijakan yang diambil

Tahapan 3. Pada Tahapan ini dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Bukti penyelenggaraan rapat koordinasi berupa Notula, surat deputi
2. Rancangan kebijakan seperti: RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko dan RPermen

Tahapan 4. Pada tahapan ini evaluasi dan monitoring kebijakan dilakukan terhadap rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Laporan monitoring dan evaluasi kebijakan
2. Laporan hasil evaluasi kebijakan
1. Dokumen/kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian adalah sebesar 3 dari 4. Indeks ini merupakan hasil perhitungan yang didapat dengan setelah melalui formulasi yang menghimpun nilai dari seluruh Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga akhir triwulan II Tahun 2026 dapat dilakukan perhitungan dengan formulasi sehingga didapat nilai Indeks 3:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3	100

Nilai diatas bersifat self assesment yang didapat berdasarkan dengan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Keberhasilan indikator Efektivitas Sinkronisasi, koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian merupakan cerminan keberhasilan seluruh Deputy di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal isu strategis terkait perekonomian. Berikut merupakan kegiatan terkait efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara lain:

1. Koordinasi dan finalisasi penyusunan peta jalan pengendalian inflkasi 2025-2027 dengan seluruh anggota TPIP.
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja TPID tahun 2024 tahap I
3. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) optimalisasi peran FTA dalam rangka mendukung penguatan ekspor nasional
4. Penyampaian surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas pengenaan BMAD terhadap Impor kertas dupleks asal korea, malaysia, dan taiwan
5. Rapat monitoring dan evaluasi serta upaya penguatan efektivitas kebijakan trade remedies
6. Koordinasi terkait persiapan pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan investasi
7. Koordinasi pembahasan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK)
8. Menghadiri Rapat terbatas Presiden terkait pembahasan Implementasi Biodiesel B50
9. Koordinasi terkait pembahasan pemberian Diskresi Smelter Nikel atas Pelaksanaan PP 28/2025
10. Koordinasi terkait optimalisasi penggunaan Batubara
11. Koordinasi Pembahasan program listrik perdesaaan (lides) Tahun 2025
12. Sinkronisasi pembahasan Inpres pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia
13. Penandatanganan Agreement on Resiprokal Trade (ART) Indonesia-AS
14. Rancangan Perubahan Perpres 40/2023 tentang Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol
15. Koordinasi terkait kebijakan pengembangan sektor industri
16. Koordinasi penyusunan dan evaluasi kebijakan strategis
17. Koordinasi terkait ketenagakerjaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan tenaga kerja
18. Koordinasi percepatan pengembangan kawasan ekonomi dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
19. Koordinasi terkait pariwisata difokuskan pada penguatan tata kelola destinasi wisata melalui penyusunan rancangan regulasi dan nota kesepahaman pemanfaatan cagar budaya.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam capaian indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat kesulitan dalam mengumpulkan para Stakeholder untuk berdiskusi langsung
- b. Masih belum terdapatnya kata sepakat dalam beberapa kebijakan untuk menyelesaikan isu

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- a. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait penyelesaian isu strategis..

5

Sasaran Strategis 5: *Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 5: ***Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*** ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian tahun 2026 adalah 3 dari 4 (Baik):

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3	100 %

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survey pelayanan ke kementerian/lembaga atau stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menghambat capaian persentase keberhasilan indeks kepuasan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kendala komunikasi dengan K/L lain terkait dengan koordinasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian
2. Masih sulitnya mendapatkan jumlah responden dalam pengisian survei kepuasan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan ini agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perlunya meningkatkan intensifitas koordinasi dalam perumusan kebijakan dengan K/L terkait.
2. Perlunya meningkatkan responden kepada kementerian/lembaga lainnya sebagai mitra kerja Kemenko Perekonomian.

6

Sasaran Strategis 6: *Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 6: ***Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas*** ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

6.1 Indeks

***Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
yang Baik***

Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kemenko Perekonomian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, melalui penerapan prinsip-prinsip good governance, penguatan sistem manajemen, serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang profesional dan integratif, sehingga mampu mendorong koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional secara optimal. Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk menjalankan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional secara efisien, akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun nasional. Tata kelola yang berkualitas berarti bahwa seluruh proses manajemen internal di Kemenko Perekonomian, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, dilaksanakan dengan:

1. Efektivitas kelembagaan, yaitu fungsi koordinasi antar kementerian/lembaga berjalan optimal.
 2. Akuntabilitas kinerja, didasarkan pada indikator yang terukur dan hasil yang nyata.
 3. Transparansi dan integritas, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
- Adaptabilitas organisasi, dalam merespons perubahan lingkungan strategis ekonomi nasional dan global, termasuk disrupsi teknologi, krisis ekonomi, dan tantangan pembangunan berkelanjutan.

Reformasi Birokrasi merupakan proses perubahan dan pembaruan yang dilakukan dalam sistem dan struktur pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas birokrasi. Reformasi birokrasi berupaya menyederhanakan proses bisnis dan menghilangkan hambatan birokrasi yang menghambat kinerja pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat maupun daerah) telah berhasil menerapkan prinsip dan program reformasi birokrasi. Indeks ini menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari Komponen RB General (60%) dan Komponen RB Tematik (40%), penilaian ini didasarkan kepada pedoman terbaru dari Kementerian PANRB (Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 dan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024). Indeks RB dikategorikan dalam nilai sekaligus predikat tertentu.

- Nilai >90 – 100 Kategori AA memiliki predikat Istimewa
- Nilai >80 – 90 Kategori A memiliki predikat Sangat Baik
- Nilai >70 – 80 Kategori BB memiliki predikat Baik
- Nilai >60 – 70 Kategori B memiliki predikat Cukup Baik
- Nilai >50 – 60 Kategori CC memiliki predikat Cukup
- Nilai >30 – 50 Kategori C memiliki predikat Buruk
- Nilai >0 – 30 Kategori D memiliki predikat Sangat Buruk

Penilaian Indeks Refromasi Birokrasi dilakukan oleh evaluator yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Indeks Refromasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik tahun 2026 adalah 3 dari 4 (Baik). Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga TW II 2026, dengan ringkasan:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 6.1. <i>Indeks Reformasi Birokrasi kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik</i>	Indeks	3 dari 4	3**	100** %

****** nilai bersifat penilaian mandiri, penilaian akhir dihasilkan diakhir tahun

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah, tetapi juga bagian integral dari visi reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kemenko Perekonomian melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian antar lintas Kementerian/Lembaga melalui peningkatan

efektifitas program, sinergisitas lintas instansi dan penguatan pemberdayaan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain :

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang disampaikan oleh Kementerian PANRB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh nilai 89,81 atau mengalami kenaikan 1,18 poin dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh capaian RB Tematik yang naik sebesar 1,18 poin.

Secara historis, tren nilai RB Kemenko Perekonomian menunjukkan peningkatan konsisten, dari 78,63 (2021), 77,95 (2022), 85,05 (2023), 88,58 (2024) hingga 89,81 (2025). Hasil ini mencerminkan perbaikan kinerja kelembagaan, penguatan sistem kerja birokrasi, serta optimalisasi implementasi program prioritas Reformasi Birokrasi

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik adalah sebagai berikut:

- a. Hingga triwulan II, Instansi pembina yaitu Kementerian PANRB belum menerbitkan Peraturan menteri PANRB yang mengatur tentang pelaksanaan RB tahun 2026 dan tahun berikutnya
- b. Belum terdapatnya penentuan tema kepada Kemenko Perekonomian tentang RB tematik yang diamankan oleh KemenPANRB

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- a. Pelaksanaan RB tetap berpedoman pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 dan SE MenpanRB Nomor 6 Tahun 2025
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi pembina terkait pelaksanaan agenda dan penilaian nilai Reformasi Birokrasi agar dapat melakukan persiapan yang lebih optimal.